Dompo Dalam Soal Agraria

oleh: **Hariadi Kartodihardjo**

Staf Pengajar di Fakultas Kehutanan IPB dan Program Pascasarjana IPB dan UI

Kesalahan yang paling banyak dilakukan oleh para pembuat kebijakan adalah keliru dalam merumuskan masalah, dan bukan keliru dalam memecahkan masalah. Demikian antara lain pernyataan dalam suatu referensi kebijakan publik. Mengerikan! Ibarat seorang dokter, banyak pembuat kebijakan keliru melakukan diagnosa, sehingga penyakit yang sebenarnya tidak diobati, dan si pasien makan obat yang keliru. Kapan, dengan demikian, pertama kali suatu kebijakan dibuat secara keliru; yaitu saat pembuat kebijakan melihat fakta.

Di kalangan akademisi dan dunia mahasiswa pada umumnya, persoalan agraria bukan hanya salah dilihat, tetapi terletak jauh di belakang tumpukan konsep dan rumus, sehingga tidak terlihat. Persoalan hak dan status sumberdaya agraria dianggap sudah mapan. Ilmu dan pengetahuan berdiri di atas kemapanan itu, dan yang tersisa adalah upaya meningkatkan produktivitas dengan teknologi, transfer pengetahuan, rekayasa pasar, fiskal dan moneter. Dan terbangunlah pembangunan ekonomi.

Di kalangan politisi dan pengamat, ukuran-ukuran pembangunan ekonomi yang berdiri di atas anggapan kemapanan hak dan status sumberdaya agraria menjadi perdebatan. Semakin elit lokus pembahasannya, semakin kabur argumen yang sampai ke publik. Politisi yang perjuangannya sesuai fakta tidak dapat muncul ke permukaan karena tidak dapat menggunakan bahasa yang sesuai dengan arus besar politisasi keadaan.

Di kalangan birokrasi pembuat kebijakan, yang dipegang adalah koridor hukum. Tidak akan ada langkah inovatif kalau tidak sejalan dengan pasal-pasal peraturan-perundangan. Tidak ada opini, yang ada adalah gerakan nyata program dan kegiatan pembangunan berdasarkan struktur penguasaan sumberdaya agraria yang *given*. Kesalahan hampir tidak dapat diperbaiki, karena faktor *"policy trap"*. Inovasi di lapangan yang sesuai dengan fakta, salah menurut pasal-pasal peraturan.

Kenyataan-kenyataan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara pikiran, keinginan dan tindakan sudah terstruktur dalam tujuan "kebenaran" yang telah terletak jauh di luar fakta. Ilmu dan teknologi, ukuran kinerja pembangunan, perjuangan politik, selalu dimenangkan oleh "kebenaran" yang asumsinya keliru. Meskipun begitu, "kebenaran" tersebut ditopang oleh bangunan sosial-politik sejak di bangku sekolahan. Seseorang petani di Jawa Tengah menyebut kondisi demikian itu sebagai dompo. Yaitu pada saat seseorang menganyam tikar, secara tidak sadar menghasilkan komposisi anyaman yang salah, tetapi sudah terlanjur ditutupi oleh komposisi anyaman yang benar. Dompo tidak akan diperbaiki – karena sama dengan membuat tikar baru, dompo menurunkan kualitas tikar. Jika dijual pun tidak akan dipilih pembeli.

Penataan kembali struktur penguasaan sumberdaya agraria–reforma agraria, adalah pondasi, bukan hanya bagi pertumbuhan ekonomi, melainkan juga keadilan sosial dan basis pelestarian fungsi sumberdaya alam. Struktur penguasaan itu sendiri terbangun oleh hubungan antar individu, individu dan lembaga, serta antar lembaga di bawah implementasi peraturan perundangan dengan berbagai bentuk transaksinya. Struktur penguasaan itu menjadi domain individu, komunitas, maupun publik lebih luas yang tidak seluruhnya dapat dijangkau oleh kekuasaan negara. Maka, dalam konstruksi sosial-politik yang dompo, niat pemerintah untuk melakukan reforma agraria perlu diikuti oleh para pengelola sumberdaya agraria itu sendiri, swasta maupun pemerintah. Itu akan terjadi apabila ukuran-ukuran kinerja keberhasilannya diperbaiki. Ini bukanlah gerakan yang hanya tergantung peraturan perundangan, melainkan kecermatan melakukan tindakan, baik di kalangan akademisi, politisi, birokrasi pemerintahan, untuk mampu mendiagnosa fakta, mengangkat masalah yang benar, agar terhindar terjadinya dompo-dompo berikutnya. ◆

Jika rakyat sudah punya hak atas tanah dan seandainya oleh rakyat diganti ke usaha lain non-pertanian. Bagaimana ?

Kan ada yang namanya *land use*, RUTRW, dan sebagainya. Dan ada UU-nya jadi penggunaannya sudah jelas. Dan niscaya petani itu akan bahagia sebagai petani kalau hasil yang dia dapat tidak hanya dari hasil produksinya, tetapi juga bisa dari capital game, saham miliknya di BEJ misalnya. Kalau pada akhirnya atau ekstrimnya petani inginnya dijadikan usaha non pertanian ya silahkan. Kalau itu yang terbaik buat rakyat, itu hak rakyat. Pemerintah juga sering tidak konsekuen. Misalnya wilayah stadion olah raga diubah peruntukkannya buat mal pertokoan. Iya kan? Pemerintah bisa melakukan itu, kok rakyat tidak boleh. Tapi saya yakin petani akan bahagia sebagai petani jika formatnya seperti yang saya katakan tadi.

Apakah ada **jaminan swasta yang menyuntikkan modal?**

Banyak swasta yang mau. Saya baru dari Jerman, perusahaan Jerman mau bantu petani-petani kita untuk diberdayakan. Wah, luar biasa.

Jika dilakukan efisiensi, pabrik dan peralatan diperbarui sehingga sama dengan swasta, apakah PTPN masih dapat hidup?

Pertanyaan paling prinsip, apakah negara punya hak legitimasi untuk terus berada di sektor ini. Selain swasta sudah bisa, masa negara bersaing dengan swasta. Negara kan punya tugas tersendiri. Kalau bicara ekonomi ya *market creating, market stabilizing, market regulating, market legitimazing*. Fungsi negara tidak berproduksi. Yang memproduksi itu petani, dan swasta lainnya. Jadi tidak pantas kalau negara bersaing dengan warganya.

Jadi negara tidak dapat bertindak sebagai produsen?

Ya, bukan di produksi. Negara menjamin agar pasar berfungsi secara baik, agar pasar tidak menciptakan eksploitasi yang besar terhadap pihak kecil, agar pasar terjamin. Itulah tugas negara. Kecuali untuk sektor yang menghasilkan barang dan jasa yang sangat teramat strategis, mis roket.

FDA/AO

"FUNGSI NEGARA TIDAK BERPRODUKSI. YANG MEMPRODUKSI ITU PETANI DAN SWASTA LAINNYA. JADI TIDAK PANTAS KALAU NEGARA BERSAING DENGAN WARGANYA."

Jika pemerintah tidak ikut campur secara signifikan dalam sektor pertanian tersebut, bagaimana?

Semakin banyak pemerintah ikut campur, faktanya di Indonesia, semakin jelek sektor ini. Ya, di mana aja kan? Yang pemerintah ikut campur, itulah yang lebih jelek.

Apa itu berarti rakyat kita lebih jago mengelola dirinya?

Ya, apalagi kalau pemerintah memberikan keleluasaan kepada (rakyatnya) untuk memberdayakan diri mereka sendiri.

Misalnya negara ingin berinvestasi, ingin berusaha di bidang yang dikerjakan swasta.

Negara tidak berhak untuk berusaha, fungsi negara itu untuk *serve citizen*, bukan bersaing dengan *citizen*.

Jadi BUMN itu, apapun bidangnya sebetulnya tidak perlu ada Pak?

Persis!

Jadi Telkom dan Pertamina juga?

Ya, seperti yang saya katakan tadi, kalau Telkom tidak ada, Indosat yang berkuasa. Indosat kan milik Singapura, bisa diobok-obok kita nanti! Larinya kan untuk produk-produk yang punya urgensi bolehlah negara berusaha di situ. Tapi untuk perkebunan, gak ada urgensinya! Perkebunan adalah produk yang bisa diselesaikan sepenuhnya oleh petani dan swasta. Nah, bagaimana agar si petani ini lebih makmur lagi? Negara lewat telkomnya meningkatkan perannya untuk membantu petani. Total *fixline* di negara ini hanya 4% dr total kebutuhan. Telkom perlu reorientasi untuk mensejahterakan rakyat, termasuk dibikin akses kepada petani-petani. Ini masalah teknologi. Sehingga para petani bisa mengetahui harga sawit, gula di pasar dunia sehingga tidak bisa dibohongi oleh para pedagang. Itu tugas negara. Bikin pelabuhan yang baik, sarana jalan yang baik. Rel kereta ap.! Itu tugas negara.

Jadi gagasan ini bukan sekedar bagi-bagi lahan?

Enggak, bisa kacau! Itulah yang kita kritisi. Bank dunia tak segan untuk membantu sertifikasi lahan petani. Tapi kan itu liberalisme. Tapi kan kita nih basic communal. Seperti di Israel, kan sosialisme, pendapatan didasarkan pada kebutuhan. Gaji supir bisa lebih besar dari majikan, jika kebutuhan si supir lebih besar. Kita gak seperti itu. Kita melakukan sosial ekonomi yang berbasis pada lokal tradition, lokal value. Itu yang saya bayangkan juga sebagai eksperimen sistem ekonomi Indonesia yang unik. ◆

(FDA/ALR)